

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap serta perilaku bermasyarakat. Proses sosial yang mana seseorang atau individu di pengaruhi oleh keadaan lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau juga sekolah, sehingga bisa mencapai perkembangan diri serta juga kecakapan sosial.<sup>1</sup>

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia), Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dalam artian disini pendidikan adalah penuntun segala sesuatu atau semua kodrat yang terdapat di dalam diri anak (peserta didik) itu sendiri, supaya mereka sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan juga dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut UU. No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dengan secara aktif mengembangkan atau menggali potensi dirinya untuk bisa atau dapat mempunyai kekuatan

---

<sup>1</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 10

<sup>2</sup>A. Rusdiana dan Yeti Heryati, *Pendidikan Profesi Keguruan (Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015), hal. 13

pengendalian diri, spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian dan juga keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara.<sup>3</sup>

Dasar pendidikan nasional adalah berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan fungsi dari Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>4</sup>

## **2. Pengertian Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.<sup>5</sup>

Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut sehingga tercipta suasana belajar yang

---

<sup>3</sup>Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 83

<sup>4</sup>UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 2 dan Pasal 3

<sup>5</sup>Indiyanto, *Implementasi Pendidikan Inklusif*, (Surakarta : FKIP UNS, 2013), hal. 9

kondusif.<sup>6</sup>

Pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang diberikan untuk memberikan kesempatan dan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar disekolah umum atau sekolah terdekat bersama-sama dengan siswa reguler lainnya sebagai upaya mengembangkan potensi siswa ABK serta tercipta suasana belajar yang kondusif tanpa saling memandang perbedaan untuk bisa bersama-sama belajar di kelas.

### **3. Konsep Pendidikan Inklusif**

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Berikut adalah konsep dalam pendidikan inklusif yaitu:

- a. Konsep anak dan Peran Orang Tua
- b. Konsep sistem Pendidikan dan Sekolah

---

<sup>6</sup>Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2005), hal. 18

<sup>7</sup>Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif, Berbasis Budaya Lokal*, (Jakarta : Depdiknas, 2005), hal. 18

<sup>8</sup>Mohammad Takdir Illahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 24

- c. Konsep Keberagaman dan Diskriminasi
- d. Konsep memajukan inklusif
- e. Konsep Sumber Daya Manusia

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua pihak harus berfikir keras untuk menghilangkan diskriminasi dan perundungan yang menyudutkan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan mereka tinggal karena pada dasarnya pendidikan inklusi dibuat agar dapat menghargai perbedaan-perbedaan.<sup>9</sup>

#### **4. Landasan Pendidikan Inklusif**

Landasan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut :

##### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah seperangkat wawasan yang menjadi dasar pendidikan inklusif, meliputi Bhineka Tunggal Ika, agama, pandangan, universal dan filosofi inklusif.

##### **b. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif untuk menjamin anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak normal lainnya. Salah satu kebijakan yang menjamin anak berkebutuhan khusus yaitu dengan adanya UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. dan lebih di rinci pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pemberian peluang khusus

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 117

untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Dan baru-baru ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2020 tentang Sanksi Administratif bagi pihak yang melanggar peraturan tentang pendidikan inklusif ini. Landasan yuridis dengan kata lain sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapat akses di setiap aspek kehidupannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Landasan Pedagogis

Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik. Peserta didik menjadi warga Negara yang beriman, bertakwa, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan anak berkebutuhan khusus dibentuk untuk bertanggung jawab. Melalui pendidikan anak berkebutuhan khusus dibentuk untuk bertanggung jawab dan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

d. Landasan Empiris

Penelitian mengenai pendidikan inklusif sudah dilaksanakan di berbagai Negara. Termasuk Pemerkasanya adalah Negara Scandinavia (Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia). Berdasarkan penelitian disebut bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan dampak positif terhadap akademik dan sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dari berbagai landasan inklusif di atas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan inklusif menjadi dasar bagi guru untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan memberikan layanan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi bukanlah pendidikan yang bukan hanya bisa dipandang sebelah mata, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak dengan anak-anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tinggi. Jika anak berkebutuhan khusus dididik dan dijaga dengan baik, mereka pun bisa tumbuh seperti anak normal lainnya bahkan lebih berprestasi lagi.

## 5. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif meliputi diantaranya :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.<sup>10</sup>

## 6. Fungsi Pendidikan Inklusif

Zaenal Alimin menjelaskan bahwa sesuai disiplin ilmu fungsi pendidikan khusus dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Fungsi Preventif

Melalui pendidikan inklusi guru melakukan upaya pencegahan agar tidak

---

<sup>10</sup>Dedy Kustawan, *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*, (Jakarta : Luxima, 2012), hal. 17

muncul hambatan-hambatan yang lainnya pada anak berkebutuhan khusus.

b. Fungsi Intervensi

Pendidikan inklusif mengangani anak berkebutuha khusus agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

c. Fungsi Kompensasi

Pendidikan inklusi membantu anak berkebutuhan khusus untuk menangani kekurangan yang ada pada dirinya dengan menggantikan dengan fungsi lainnya.<sup>11</sup>

## 7. Prinsip Pendidikan Inklusif

Florian mengemukakan bahwa pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut:

- a. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama.
- b. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar.
- c. Tidak ada satu alasanpun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki bukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Johnsen dan Skojen menjabarkan tiga prinsip dasar pendidikan inklusif:

- a. Setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam satu kelas atau kelompok.
- b. Hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan

---

<sup>11</sup>Dedy Kustawan & Yani Mei Mulyani, *Mengenal pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Inplementasinya*, (Jakarta : Luxima, 2013), hal. 20

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 33

sepuas hati.

- c. Guru berkerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasi keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas.<sup>13</sup>

Mulyono juga telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif menjadi sembilan elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan:

- a. Sikap guru yang positif terhadap kebhinekaan.
- b. Interaksi promotif.
- c. Pencapaian kompetensi akademik dan sosial.
- d. Pembelajaran adaptif.
- e. Konsultasi kolaboratif.
- f. Hidup dan belajar dalam masyarakat.
- g. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga.
- h. Belajar dan berfikir *independent*.
- i. Belajar sepanjang hayat.<sup>14</sup>

Dari beberapa uraian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan inklusif semua sama peserta didik mempunyai hak yang bermain dan belajar bersama, mengapresiasi keanekaragaman, dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas.

## 8. Model sekolah inklusi

---

<sup>13</sup>Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif . . .*, hal. 41

<sup>14</sup>Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif . . .*, hal. 54



Terdapat beberapa model sekolah inklusi yang ada di Indonesia yakni seperti yang diungkapkan oleh Emawati sebagai berikut :

a. Kelas Reguler (Inklusi Penuh)

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

b. Kelas Reguler dengan *Cluster*

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus.

c. Kelas Reguler dengan Pull Out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

d. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

e. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler.

f. Kelas Khusus Penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah

regular.<sup>15</sup>

## 9. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Karakter utama pendidikan inklusi adalah keterbukaan dan memberikan kesempatan anak yang membutuhkan layanan pendidikan secara adil, karakteristik pendidikan inklusif yaitu diantaranya:

- a. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu.
- b. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- c. Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.
- d. Diperuntukan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus.<sup>16</sup>

Peneliti berpendapat bahwa keterbukaan dan kesamaan adalah karakteristik utama pendidikan inklusi. Dalam sekolah inklusi siswa tidak boleh dibeda-bedakan dalam proses belajar mengajar karena hal ini bisa berdampak buruk bagi siswa. Selama memungkinkan dan bisa, semua anak seharusnya atau seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

## 10. Program Pendidikan Inklusif

Dalam manajemen strategi inklusi paling sedikit mencakup tiga aspek

---

<sup>15</sup>I. P. Darma & B. Rusyidi, *Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia*, (*Jurnal Prosiding : Riset & PKM*, 2003), Hal. 226-227. (Vol. 2, No. 2, Hal. 147-300, ISSN 2442-4480), Diakses dari <http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index.php/prosiding/article/viewFile/113/97>. Pada 22 Desember 2020

<sup>16</sup>M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep . . .* hal. 44

yaitu perencanaan, penerapan dan pengawasan. Pada aspek perencanaan diantaranya meliputi pengembangan visi misi dan tujuan sekolah yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lingkungan sekitar.<sup>17</sup>

Dalam implementasi atau penerapan, proses pembelajaran sebaiknya perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar hasil assemen dan dibuat bersama antara guru pendamping khusus dan guru kelas dalam bentuk program pembelajaran individual, berikutnya pada pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru pendamping khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus.<sup>18</sup>

Dalam tahap evaluasi perlu penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum. Mengacu pada hasil hasil assemen, serta mempertimbangkan penggunaan penilaian, acuan, norma, pelaksanaan evaluasi sebaiknya secara fleksibel, multimetode, dan berkelanjutan. Selain itu guru harus secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua.<sup>19</sup>

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif banyak faktor-faktor

---

<sup>17</sup>Sukinah, *Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif*, (Jurnal Pendidikan Khusus : Jurnal Tidak Diterbitkan, 2010) (Vol.7 Nomor 2), hal. 43

<sup>18</sup>Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif "Konsep, kebijakan, dan Impelentasi dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa"*, (Jurnal DIA Administrasi Publik : Jurnal Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 7 [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur\\_Pend\\_Luar\\_Biasa/195607221985\\_031\\_-Sunaryo/jurnal\\_Inklusi.Pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/Jur_Pend_Luar_Biasa/195607221985_031_-Sunaryo/jurnal_Inklusi.Pdf) diakses pada tanggal 27 Januari 2021

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 9

yang harus dipertimbangkan,<sup>20</sup> antara lain : (a) kebijakan hukum dan perundang-undangan, (b) sikap, pengalaman dan pengetahuan, (c) tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (d) perubahan paradigma pendidikan seperti: desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar), (e) adaptasi lingkungan, dan (f) kerja sama kemitraan yang meliputi: pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat

## 11. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif

### a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Memang, istilah anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang luas. Dapat kita buat kesimpulan bahwa Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens.<sup>21</sup> Mereka mungkin memang ada yang memiliki kekuangan fisik, hambatan dalam belajarnya, akan tetapi bukankah hal itu bukan menjadi suatu alasan untuk memberi pelayanan pendidikan yang sama baiknya kepada mereka sama halnya yang diberikan pada anak normal / anak reguler pada umumnya.

### b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan

Dalam pendidikan inklusi setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Konsep anak dalam pendidikan

---

<sup>20</sup>Prastiyono, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif*, (Jurnal DIA jurnal Administrasi Publik : Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 4 (Vol. 11, No. 1, Hal. 117 –128), diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwvofj08vRAhVKQo8KHXSAm8QFghHMAc&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untagsby.ac.id%2Findex.hp%2Fdia%2Farticle%2Fdownload%2F294%2F182&usg=AFQjCNFISGOcNJS1iEe0HfdSgA0lwS9w&sig2=PQY9m7qwiA7hfalPldGPow&bvm=bv.144224172,d.c2I>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

<sup>21</sup>M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep . . .*, hal. 138

berkebutuhan khusus yaitu:

1. Anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer biasanya anak mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Hambatan belajar pada anak jenis ini dapat disembuhkan jika orang tua atau pendidik mampu memberikan terapi penyembuhan secara berkala.
2. Anak memiliki kelaianan atau kebutuhan khusus yang bersifat permanen atau tetap. Biasanya anak mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena bawaan dari lahir atau kecelakaan yang berdampak permanen atau tidak dapat disembuhkan lagi. Contohnya: tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, autisme. Jenis anak berkebutuhan khusus ini perlu dilakukan pendampingan dan perhatian penuh agar bisa mengatasi hambatan belajar dan perkembangan jiwanya.<sup>22</sup>
3. Karakteristik Akademik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi  
Mengajar di sekolah inklusi berbeda dengan mengajar di sekolah reguler yang semua siswanya berasal dari kalangan anak normal. Perlu adanya penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah reguler berbasis inklusi guna menunjang prestasi akademiknya.

Berdasarkan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi  
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jendral

---

<sup>22</sup>M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep . . .*, hal. 139.

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Ruang lingkup manajemen sekolah dalam rangka pendidikan inklusi sekurang-kurangnya mencakup 8 manajemen sekolah agar pendidikan inklusi bisa terlaksana sesuai dengan tujuan, 8 aspek yakni diantaranya:

- a. Pengelolaan peserta didik
- b. Pengelolaan kurikulum
- c. Pengelolaan pembelajaran
- d. Pengelolaan penilaian
- e. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana
- g. Pengelolaan pembiayaan
- h. Pengelolaan sumberdaya masyarakat.<sup>23</sup>

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan guna meningkatkan hasil belajar siswa yang maksimal. Diantara penelitian terdahulu yaitu:

*Pertama*, Penelitian dari Prastiyono dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Dasar Galuh Handayani Surabaya)” di Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah, untuk mengamati perilaku implementor dari Dinas Pendidikan Kota dan lembaga sekolah pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan inklusi,

---

<sup>23</sup>Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hal. 4

mengamati pelaksanaan program kerja guru dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi Galuh Handayani Surabaya, mengamati pelaksanaan pendidikan inklusif. proses pembelajaran serta mengamati pelaksanaan evaluasi dan pemantauan manajemen pendidikan inklusif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di Galuh Handayani belum optimal atau terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari indikasi seperti: (1) tidak semua guru mampu melaksanakan pendidikan inklusif dengan baik, (2) tidak semua orang tua memahami pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Kedua, faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah faktor komunikasi yaitu sosialisasi hanya diadakan dua kali pertemuan dalam satu semester. Faktor sumber daya meliputi: tidak semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pendidikan inklusif dan keterbatasan dana untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Faktor disposisi antara lain: tidak semua guru memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Juga faktor struktur birokrasi dari pelaksana: dinilai baik karena melaksanakan tugas sesuai standar operasional dan struktur organisasinya ramping.<sup>24</sup>

*Kedua*, Penelitian dari Betty dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada SDN 9 Palangka di Kota Palangka Raya”. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 9 Palangka, (2) mengetahui tingkat

---

<sup>24</sup>Prastiyono, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya)” Dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Juni 2014), Vol. 11, No. 1, Hal. 117 – 128, Diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 14.25 WIB

kesiapan Guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dikota Palangka Raya, (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Palangka Raya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, Lokasi Penelitian bertempat di SDN 9 Palangka kota Palangka Raya. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling, Sumber Data berasal dari Informen, Dokumen, atau arsip. Teknik Pengumpulan Data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis Data menggunakan Analisis Interaktif Miles-Huberman sedangkan Validitas Datanya menggunakan triangulasi teknik atau Triangulasi sumber. Hasil penelitian implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah (1) Pada dimensi komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bahwa implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Sumber daya dari aspek yang belum memadai misalnya sarana dan prasarana dan jumlah guru pembimbing khusus yang masih kurang untuk menangani anak berkebutuhan khusus (3) Pada dimensi disposisi penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, namun dari aspek pemberian insentif oleh (Direktorat atau Dinas pendidikan Kota Palangka Raya) sangat belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah. Sedangkan pada dimensi struktur birokrasi juga kurang memadai, hal ini terlihat belum adanya tim khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, seperti : guru pembimbing khusus, tim ahli dari berbagai disiplin ilmu (dokter, psikolog, dll).<sup>25</sup>

*Ketiga*, Penelitian dari Putu Ayu Mira Kusuma Dewi & I Nyoman

---

<sup>25</sup>Betty, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada SDN 9 Palangka di Kota Palangka Raya", dalam *Jurnal Meretas* (Juni 2018), Vol. 5, No. 1, Diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 14.33 WIB



Subanda dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Buleleng (SDN 2 Paket Agung dan SDN 2 Bengkala)”. Penelitian ini mengkaji masalah implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng beserta factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu pondasi sarana pencapaian tujuan negara dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Namun yang terjadi belakangan adalah adanya ketidak merataan dalam porsi pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kesempatan yang baru bagi pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Disusul dengan dikeluarkannya Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Pendidikan Inklusif adalah system pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran bersama-sama pada anak normal pada umumnya. Melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng menunjuk sekolah piloting inklusif yaitu SDN 2 Paket Agung dan SDN 2 Bengkala. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 2 Paket Agung dan SDN 2 Bengkala sebagai model penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif.<sup>26</sup> Dari data hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng belum berjalan seperti apa yang seharusnya karena masih adanya beberapa factor penghambat seperti jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas dan kualitas, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan, khusus ditambah lagi persepsi masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus masih keliru. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng antara lain Faktor Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan, Faktor sumber-sumber kebijakan, Faktor Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan, Faktor Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Faktor Kondisi Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Faktor Kecenderungan pelaksana (Implementors).

*Keempat*, Penelitian dari Cintia Rofiqi, dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bolo Demak”. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Bolo Demak dan sub fokusnya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu primer dan sekunder. data primer berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder dari

---

<sup>26</sup>Putu Ayu Mira Kusuma Dewi & I Nyoman Subanda, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Buleleng” dalam *Jurnal Administrator* ISSN : 2086-0528, Vol. 9, No. 1, (Februari 2017) : 97-113 Dalam : <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/map/>, Diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 14.54 WIB

observasi, dokumen. Analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.<sup>27</sup> Hasil penelitian ini adalah 1) komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terdiri dari komunikasi dengan pendidik yaitu guru ABK dan tenaga kependidikan yaitu staf tata usaha dan psikolog. Komunikasi eksternal diantaranya adalah dengan pihak pihak luar seperti UPTD DIKBUD Kec. Demak, Orang tua siswa, Komite Sekolah., 2) sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi tiga hal yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Sumber daya manusia terdiri dari guru pendamping ABK. Guru mata pelajaran dan psikolog. Sumber daya anggaran terdiri dari Anggaran dari Dana BOS, anggaran dari Dana Pemda dan Anggaran dari dana swadaya. Sumber daya fasilitas terdiri dari sarana gedung, kelas dan media dan alat bantu belajar, 3) disposisi implementator kebijakan pendidikan inklusi meliputi: jujur dalam segala aspek oleh semua stakeholder sekolah, tanggung Jawab pada masing masing TUPOKSI, Teman work yang solid sebagai satu kesatuan, 4) struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi terdiri dari: standar Operasional Procedur (SOP), struktur birokrasi kepengurusan, standar sistem penilaian.

*Kelima*, Penelitian dari Robiansyah, dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka

---

<sup>27</sup>Cintia Rofiqi, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bolo Demak” Dalam *Jurnal Administrator* ISSN : 2086-0528 , Vol. 9, No. 1, (Pebruari 2017) : 97-113 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/map/> Diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 15.15 WIB

mengetahui keterlaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dalam perspektif analisis kebijakan pendidikan antara lain: Kebijakan (formulasi), Pelaksanaan (Implementasi), evaluasi dan monitoring, serta implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Kondisi faktual pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar yang berada di Kota Cimahi berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif; (2) Faktor pendukung dan penghambat realisasi dari implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif terkait upaya mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif di Kota Cimahi; (3) Desain hipotetik model implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan varian pendekatan penelitian kualitatif dan berdasarkan sifat serta karakteristik data maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Lokasi penelitian bertempat di Kota Cimahi yang ditunjukkan kepada kepala dinas pendidikan, SLBN-A Citeureup sebagai pusat sumber inklusi, dan SDN Cimahi Mandiri II sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui pedoman studi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif sudah diselenggarakan sejak tahun 2007, Dengan dasar itu pemerintah kota cimahi pada tahun 2011 menetapkan SLBN A Citeureup sebagai Pusat Sumber. Dengan asumsi 3 (tiga) sekolah dasar (SD) sumber

dukungan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu SDN Cimahi Mandiri II, SDN Sosial II dan SD Hikmah Teladan dan 23 sekolah dasar imbas menuju Inklusi; (2) Keterlaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah inklusif tergambarakan melalui pelaksanaan pendidikan inklusif berbasis proses untuk mencapai sekolah inklusif yang bermutu, dengan alur input-proses-output dan dilaksanakan dalam manajemen peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya, dan hubungan sekolah dengan masyarakat; (3) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisai dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait namun hal itu dirasakan belum berjalan dengan efektif dan efisien, hal itu termasuk penyiapan sumber daya dalam mendukung keterlaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, disamping itu peran para aparat pelaksana kebijakan individu maupun kelompok sasaran yang ada, masih belum memahami secara utuh mengenai isi dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif, namun mereka dapat menunjukkan sikap penerimaan dan dukungan yang proaktif; (4) Menyusun desain hipotetik implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif disusun dengan memperhatikan beberapa variabel, variabel yang cukup krusial adalah aktivitas pendidikan inklusif dan komunikasi antar organisasi yang harus terintegrasi dengan sinersia di antara lima aktivitas kebijakan yakni: ukuran dan tujuan pemerataan pendidikan inklusif, sikap aparat pelaksana, karakteristik badan pelaksana, sumber daya dan kondisi pendidikan inklusif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Robiansyah, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi” dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, (Tesis : Tidak Diterbitkan, 2017), Diakses pada 30 Agustus 2020 pada pukul 15.49 WIB

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Judul Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Prastiyono (2014) “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya)”	Sama-sama Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Wilahnya masing-masing dan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sama jua.	Peneliti dalam penelitiannya berfokus terhadap Anak Didik / siswanya untuk diteliti sedangkan untuk Beliau mengamati perilaku implementor dari Dinas Pendidikan Kota dan lembaga sekolah pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan inklusi, mengamati pelaksanaan program kerja guru dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi Galuh Handayani Surabaya, untuk mengamati pelaksanaan pendidikan inklusif. Lokasi Penelitian nya pun juga berbeda, Peneliti Meneliti di Kota Blitar sedangkan Beliau di Surabaya.	Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di Galuh Handayani belum optimal atau terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari indikasi seperti: (1) tidak semua guru mampu melaksanakan pendidikan inklusif dengan baik, (2) tidak semua orang tua memahami pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Kedua, faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah faktor komunikasi yaitu sosialisasi hanya diadakan dua kali pertemuan dalam satu semester. Faktor sumber daya meliputi: tidak semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pendidikan inklusif dan keterbatasan dana untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Faktor disposisi antara lain: tidak semua guru memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Juga faktor struktur birokrasi dari pelaksana: dinilai baik karena melaksanakan tugas sesuai standar operasional dan struktur organisasinya ramping.
2.	Betty (2018) “Implementasi	Sama-sama Meneliti Untuk mengetahui dan	Peneliti dalam Metode Penarikan /pencarian data melalui informan	Hasil penelitian implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah (1) Pada dimensi komunikasi atau sosialisasi

	Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada SDN 9 Palangka di Kota Palangka Raya”	mendeskripsikan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sama jua.	banyak. Sedangkan Beliau pake Metode penarikan sampel adalah purposive sampling Lokasi Penelitian nya pun juga berbeda, Peneliti Meneliti di Kota Blitar sedangkan Beliau di Palangka Raya.	tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bahwa implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Sumber daya dari aspek yang belum memadai misalnya sarana dan prasarana dan jumlah guru pembimbing khusus yang masih kurang untuk menangani anak berkebutuhan khusus (3) Pada dimensi disposisi penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, namun dari aspek pemberian insentif oleh (Direktorat atau Dinas pendidikan Kota Palangka Raya) sangat belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah. Sedangkan pada dimensi struktur birokrasi juga kurang memadai, hal ini terlihat belum adanya tim khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, seperti : guru pembimbing khusus, tim ahli dari berbagai disiplin ilmu (dokter, psikolog, dll).
3.	Putu Ayu Mira Kusuma Dewi & I Nyoman Subanda (2017) “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Buleleng”	Sama-sama Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Wilahnya masing-masing dan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Teknik analisis data yakni deskriptif	Peneliti dalam fokus Penelitiannya hanya membahas kendala apa saja yang dihadapi juga bagaimana upaya menghadapinya sedangkan Beliau membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pendidikan Inklusi. Lokasi Penelitian nya	hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng belum berjalan seperti apa yang seharusnya karena masih adanya beberapa factor penghambat seperti jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas dan kualitas, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan, khusus ditambah lagi persepsi masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus masih keliru. Faktor-faktor yang

		kualitatif.	pun juga berbeda, Peneliti Meneliti di Kota Blitar sedangkan Beliau di Buleleng.	berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Buleleng antara lain Faktor Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan, Faktor sumber-sumber kebijakan, Faktor Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan, Faktor Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Faktor Kondisi Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Faktor Kecenderungan pelaksana (Implementors).
4.	Cintia Rofiqi (2017) "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bolo Demak"	Sama-sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Juga sama-sama Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Wilahnya.	Peneliti dalam fokus penelitiannya mengenai apa saja kendala dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusi ini sedangkan Beliau hanya mengenai bagaimana jalannya implementasinya kebijakan pendidikan inklusi. Lokasi Penelitian nya pun juga berbeda, Peneliti Meneliti di Kota Blitar sedangkan Beliau di Demak.	Hasil penelitian ini adalah 1) komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terdiri dari komunikasi dengan pendidik yaitu guru ABK dan tenaga kependidikan yaitu staf tata usaha dan psikolog. Komunikasi eksternal diantaranya adalah dengan pihak pihak luar seperti UPTD DIKBUD Kec. Demak, Orang tua siswa, Komite Sekolah., 2) sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi meliputi tiga hal yaitu manusianya, anggarannya dan fasilitasnya. Sumber daya manusia terdiri dari guru pendamping ABK. Guru mata pelajaran dan psikolog. Sumber daya anggaran terdiri dari Anggaran dari Dana BOS, anggaran dari Dana Pemda dan Anggaran dari dana swadaya. Sumber daya fasilitas terdiri dari sarana gedung, kelas dan media dan



				alat bantu belajar, 3) disposisi implementator kebijakan pendidikan inklusi meliputi: jujur dalam segala aspek oleh semua stakeholder sekolah, tanggung Jawab pada masing masing TUPOKSI, Temanwork yang solid sebagai satu kesatuan, 4) struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi terdiri dari: standar Operasional Procedur (SOP), struktur birokrasi kepengurusan, standar sistem penilaian.
5.	Robian Syah (2017) "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kota Cimahi"	Sama-sama Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Wilayahnya masing-masing dan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulanya data yang sama jua.	Peneliti dalam Uji Keabsahan datanya menggunakan Triangulasi sedangkan Pak Robiansyah tidak menggunakannya. Lokasi Penelitiannya pun juga berbeda, Peneliti Meneliti di Kota Blitar sedangkan Beliau di Cimahi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif sudah diselenggarakan sejak tahun 2007, Dengan dasar itu pemerintah kota cimahi pada tahun 2011 menetapkan SLBN A Citeureup sebagai Pusat Sumber. Dengan asumsi 3 (tiga) sekolah dasar (SD) sumber dukungan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu SDN Cimahi Mandiri II, SDN Sosial II dan SD Hikmah Teladan dan 23 sekolah dasar imbas menuju Inklusi; (2) Keterlaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah inklusif tergambarakan melalui pelaksanaan pendidikan inklusif berbasis proses untuk mencapai sekolah inklusif yang bermutu, dengan alur input-proses-output dan dilaksanakan dalam manajemen peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya, dan hubungan sekolah dengan masyarakat;

				<p>(3) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisai dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait namun hal itu dirasakan belum berjalan dengan efektif dan efisien, hal itu termasuk penyiapan sumber daya dalam mendukung keterlaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, disamping itu peran para aparat pelaksana kebijakan individu maupun kelompok sasaran yang ada, masih belum memahami secara utuh mengenai isi dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif, namun mereka dapat menunjukkan sikap penerimaan dan dukungan yang proaktif;</p> <p>(4) Menyusun desain hipotetik implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif disusun dengan memperhatikan beberapa variabel, variabel yang cukup krusial adalah aktivitas pendidikan inklusif dan komunikasi antar organisasi yang harus terintegrasi dengan sinersia di antara lima aktivitas kebijakan yakni: ukuran dan tujuan pemerataan pendidikan inklusif, sikap aparat pelaksana, karakteristik badan pelaksana, sumber daya dan kondisi pendidikan inklusif.</p>
--	--	--	--	---

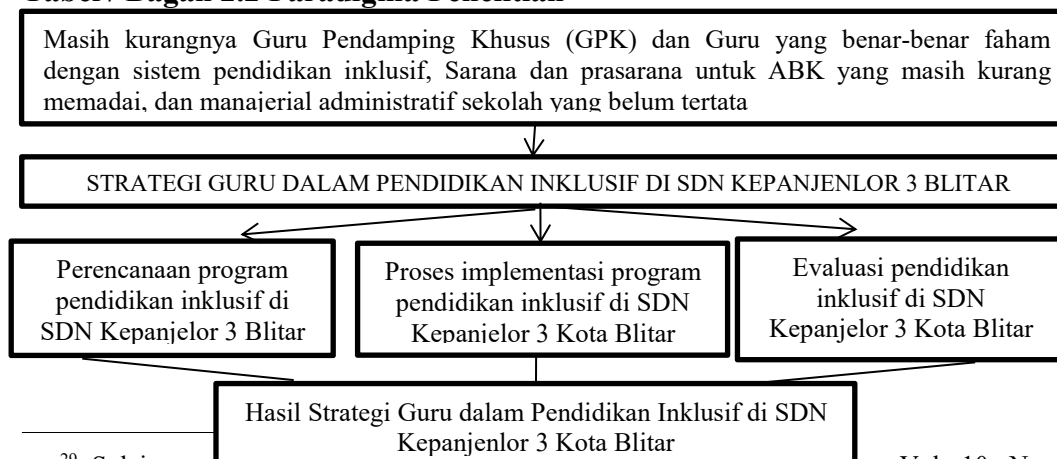
Jadi dapat disimpulkan dari setiap beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang / ini pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Pada intinya Persamaan yang dimiliki antara satu Peneliti dengan Peneliti lainnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan meneliti mengenai

Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah tingkat Dasar baik itu SD/SDI/SDN/MI/MIN. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi Fokus penelitiannya, serta subjek yang diteliti dan tempat / lokasi penelitiannya. Dari beberapa hasil penelitian Kualitatif ini dapat dilihat dan dirasakan, dengan adanya implementasi atau pelaksanaan Pendidikan Inklusif di beberapa daerah menunjukkan bahwa masih perkiraan maksimal 50% dalam pencapaiannya keberhasilannya. Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui apa saja hambatan / kendala yang sering terjadi dalam pengimplementasian pendidikan inklusif ini di Indonesia khususnya di Kota Peneliti yakni Kota Blitar, juga peneliti berusaha untuk mencari solusi / usaha untuk mengatasi hambatan / kendala yang terjadi agar keberhasilan pengimplementasian pendidikan inklusif ini meningkat.

### C. Paradigma Penelitian

Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Baik itu meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuan dalam mengolah ilmu.<sup>29</sup>

**Tabel / Bagan 2.2 Paradigma Penelitian**



<sup>29</sup> Sulaiman, Paradigma dalam Penelitian Tindakan, dalam Jurnal Realun Vol. 10, No. 2, (Agustus 2018), hal. 258 di akses pada tanggal 21 Maret 2021

Masih banyaknya masyarakat yang memandang sebelah mata ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), masih terbatasnya SLB (Sekolah Luar Biasa) yang bisa dijangkau para ABK, kurangnya GPK (Guru Pendamping Khusus) dan Guru yang faham dengan sistem pendidikan inklusif, Sarana dan prasarana untuk ABK yang masih kurang memadai, dan manajerial administratif sekolah yang belum tertata menjadi suatu permasalahan sistem pendidikan di SDN Kepanjenlor 3 Kota Blitar. Dari berbagai masalah yang timbul tersebut, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yakni dengan menerapkan atau mengimplementasikan suatu sistem pendidikan inklusif. Suatu sistem pendidikan yang tidak membedakan peserta didik, semua mendapatkan dan kewajiban yang sama di sekolah reguler / sekolah umum untuk belajar bersama-sama. Pada implementasi pendidikan inklusif di SDN Kepanjenlor 3 Kota Blitar ini terdapat perencanaan implementasi program pendidikan inklusif, proses implementasi program pendidikan inklusif, dan terdapat juga evaluasi implementasi program pendidikan inklusif di SDN Kepanjenlor 3 Kota Blitar. Setelah ketiga hal tersebut di terapkan maka pasti akan muncul hasil implementasi pendidikan inklusif di SDN Kepanjenlor 3 Kota Blitar yang akan diuraikan oleh peneliti di Bab IV nanti.